

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sampah pemicu utama yang menjadi penyebab masalah lingkungan hidup dan kesehatan lingkungan. Tentu tidak dapat mudah lepas dari permasalahan lingkungan misalnyapermasalahan banjir, kebakaran hutan pencemaran (tanah,udara,air), sampah dan limbah dan lainnya. Namun beragam problematika yang terjadi pada negara kitayaitu masalah tentang sampah sebagai sumbermasalah pokok yang paling dibicarakan oleh penduduk Indonesia. Sampah adalah suatu limbah yang sulit di daur ulang butuh proses tahunan untuk menggantinya menjadi barang yang lebih berharga dan bernilai. Polemik permasalahan sampah begitu kompleks saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Sampah yang paling sering kita temukan yaitu sampah plastik, botol minuman bekas, kaleng, dan bungkus kemasan. Biasanya masyarakat sehabis membeli minuman di pasar atau minimarket secara sengaja membuang sampah tersebut tanpa diolah terlebih dahulu. Hal seperti inilah yang menimbulkan polemik dalam jangka waktu kedepannya. Sampah yang terbuang akan membusuk menimbulkan pencemaran lingkungan yg bisa merusak oksigen, merusak ekosistem makhluk hidup, rantai makanan, dan matinya tumbuhan akibat zat beracun yang membusuk dari sampah tersebut.

Menurut Brown et.al (1999:1) pada awal tahun 1992, Akademi Sains Nasional Amerika Serikat dan *The Royal Society of London* pada sebuah penjelasan awalnya itu adalah : “ Andai Saja Prediksi-Prediksi Penambahan warga lokal masa yang sedang dijalani terkuak fakta nyata dan gelembung-gelembung aktivitas orang pada bumi yg kita tempati tetap tidak berganti, ilmu pengetahuan dan teknologi boleh jadi tidak dapat meminimalisir kemunduraan ekosistem yang tak dapat disembuhkan lagi atau meminimalisir terjadinya kemelaratan keberlanjutan untuk setengah bagian dunia”

Pendapat dari Brown et.al telah dibenarkan oleh Laporan Peninjauan Hasil yg sumbernya bernama Lembaga Antar Pemerintah Tentang Kerusakan Iklim periode 2007 yang telah ringkas dari Kementerian Lingkungan Hidup Negara menjelaskan data antara 12 hingga 13 tahun paling panas dari tahun 1850 selalu terjadi pada 13 tahun terakhir. Naiknya Suhu total dari 1850-1899

sampai 2001-2005 yaitu 0,76 derajat *Celsius*. Permukaan air laut juga naik 1,8 mm per tahun dari 1961-2003. Kenaikan pada 2 dekade kedepan dari pada abad 20 menjadi 0,17m. Hasil Kajian *Intergovernmental Panel on Climate Change* yang menjelaskan bahwa aktivitas manusia mendukung *Global Warming* dari abad pertengahan hingga abad 21 dan akan terus terjadi jika tidak ada usaha mencegahnya.

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa Lingkungan Hidup merupakan sebuah gabungan dari ruang dengan seluruh benda, keadaan, daya, dan makhluk hidup, seperti Manusia dan tindakannya yang berhubungan dengan kelangsungan perikehidupan, memberi dampak terhadap alam tersebut, kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lainnya. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai bentuk efisien dan terpadu yang dilaksanakan agar memelihara fungsi lingkungan hidup dan meminimalisir terjadinya pencemaran, polusi, perlindungan, kerusakan lingkungan, pengawasan, serta keadilan hukum. Permasalahan Sampah sering sekali ditemukan di kota besar seperti Kota Semarang.

Menurut Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2019, Produksi Sampah di Kota Semarang sebanyak 1200 Ton Per hari. Apabila jumlah sampah tidak terkendali Luas TPA Jatibarang yang hanya 46 Hektar tidak dapat menampung lagi dalam periode 10 tahun kedepan. Sekarang ada 83 Bank Sampah dari 177 Kelurahan di Kota Semarang. Pemerintah terus mensosialisasikan agar masyarakat sadar dan mampu mengurangi jumlah sampah di Kota Semarang. Pemerintah berencana mengaktifkan Bank Sampah di setiap kelurahan minimal mempunyai 1 sampai 3 Bank Sampah di Kota Semarang agar bisa mengurangi sampah dan bisa mengolah limbah gas metana menjadi Energi Listrik melalui Tenaga Incenerator. Pemerintah juga menjalankan Perda Nomor 6 Tahun 2012 Pasal 71 Tentang Operasi Yustisi Sampah. Jadi Pemerintah bersama Satpol PP memberantas dan menertibkan pelaku pembuangan sampah sembarangan di sungai ataupun di jalanan. Perda ini mensosialisasikan bahwa jika punya sampah sebaiknya diberikan saja ke Bank Sampah sekitar rumah, agar lingkungan tetap terjaga dan lestari dari bahaya pengaruh buruk sampah.

Tabel 1.1**Beberapa Bank Sampah di Kecamatan Banyumanik pada tahun 2019/2020**

Nama Bank Sampah	Kecamatan/Kelurahan	Barang yg di olah
Bank Sampah Payung Lestari	Pudakpayung	Sampah plastik, tissue, botol, kain
Bank Sampah Srongol Wetan	Srongol Wetan	Sampah ternak hewan
Bank Sampah Gedawang Asri	Gedawang	Sampah kertas, duplex, kardus, plastik, besi, botol, koran, dan lain-lain
Bank Sampah Sumurboto	Sumurboto	Sampah tanaman, hewan, kantung plastik, sampah kemasan
Bank Sampah SMAPA	Banyumanik	Sampah makanan, minuman, plastik, pupuk, kresek
Bank Sampah Pudakpayung	Pudakpayung	Sampah kain, botol, plastik, Sampah basah, sampah kering
Bank Sampah Dinar Resik	Padangsari	Sampah bekas pakai, sampah yang tidak terpakai
Bank Sampah Pandowo Berjaya	Banyumanik	Sampah rumah tangga, sampah industry, sampah plastik
Bank Sampah Aulia Barokah	Padangsari	Kain, tissue, pupuk
Bank Sampah Ngudi Lestari	Tinjomoyo	Pupuk, plastik, kain sampah, kemasan

Sumber : Kemenlhk Jawa Tengah 2020

Tabel 1.1 Kita dapat menjelaskan bahwa Kecamatan Banyumanik sendiri telah mempunyai 10 Bank Sampah di 11 Kelurahan di Kecamatan Banyumanik. Bank Sampah di Kecamatan Banyumanik sendiri menerima berbagai produk sampah seperti sampah rumah tangga, sampah dapur, sampah industri, sampah plastik, sampah kemasan, sampah kain, sampah tissue, sampah pupuk, sampah ternak hewan, hingga sampah elektronik. Namun faktanya kontribusi bank sampah di lapangan dalam mengelola sampahnya masih belum baik disebabkan karena sarana prasarana TPS yang paling sedikit Kelurahan Gedawang di Kecamatan Banyumanik

Tabel 1.2

Jenis Sampah dan Jumlah Volume Sampah Kecamatan Banyumanik 2020

Kategori Sampah yg diolah	Jumlah Volume Sampah
Sampah Harian	1270,13 Ton/Hari
Sampah Kompos	250,00 Ton/Hari
Sampah Daur Ulang	261 Ton/Hari
Sampah Bahan Bakar	50.00 Ton/Hari
Sampah Bank Sampah	20,00 Ton/Hari
Sampah Rumah Tangga	795,21 Ton/Hari

Sumber : Sipsn MENLHK 2020

Tabel 1.2 Tersebut tercatat pada 2019-2020 Jumlah Volume Sampah Harian mencapai 1270 Ton per hari, maka untuk mengurangi dari banyaknya jumlah sampah dibangunlah Bank Sampah Gedawang Asri di Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik sebagai upaya untuk mengurangi sampah harian di Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik. Namun kontribusinya belum terasa karena bank sampah di gedawang hanya 1 dan sarana prasarana tps nya juga cuma 1 yang ada di Kelurahan Gedawang

Tabel 1.3

Jumlah Timbulan Sampah Kota Semarang per hari (2021)

No	Kecamatan	Timbulan Sampah	Persentase
1.	Gunungpati	201,11 m ³	4,30%
2.	Mijen	132,71 m ³	2,80%
3.	Banyumanik	365,88 m ³	7,80%
4.	Gajahmungkur	201,32 m ³	4,30%
5.	Tembalang	361,59 m ³	7,70%
6.	Genuk	220,39 m ³	4,70%
7.	Tugu	84,48 m ³	1,80%
8.	Gayamsari	220,9 m ³	4,70%
9.	Ngaliyan	364,06 m ³	7,80%
10.	Candisari	271,93 m ³	5,80%
11.	Semarang Selatan	273,01 m ³	5,80%
12.	Semarang Utara	429,42 m ³	9,10%
13.	Semarang Tengah	270,12 m ³	5,80%
14.	Semarang Timur	286,3 m ³	6,10%
15.	Semarang Barat	513,07 m ³	11,01%
16.	Pedurungan	482,05 m ³	10,30%

Sumber : DKP Kota Semarang 2021

Tabel 1.3 terlihat bahwa Kecamatan Banyumanik penghasil timbulan sampah tertinggi dan terendah yaitu Kecamatan Tugu. Kecamatan Banyumanik menghasilkan 365,88 dan persentase timbulan sampahnya yaitu 7,80% dari semua sampah di Kota Semarang. Hal tersebut perlu untuk di kaji dan di tertibkan lagi agar timbulan sampah yang ada di Kecamatan Banyumanik khususnya Kelurahan Gedawang semakin sedikit dengan dukungan oleh bank sampah dan sarana prasarana tps juga perlu diperbaiki.

Tabel 1.4

Tingkat Pengangkutan Sampah Per Minggu Di Kota Semarang 2020

No.	Kecamatan	Tingkat Pengangkutan Sampah / per Minggu
1.	Banyumanik	27%
2.	Gunungpati	20%
3.	Tugu	45%
4.	Candisari	41%
5.	Genuk	19%
6.	Pedurungan	18%
7.	Tembalang	17%
8.	Mijen	20%
9.	Gayamsari	39%
10.	Gajahmungkur	62%
11.	Ngaliyan	14%
12.	Semarang Tengah	100%
13.	Semarang Utara	29%
14.	Semarang Selatan	77%
15.	Semarang Timur	48%
16.	Semarang Barat	43%
	Rata-Rata	38%

Sumber : Dinas Pertamanan 2020

Berdasarkan Tabel 1.4 Tingkat Pengangkutan dalam Pengelolaan Sampah di Kota Semarang dari analisis datanya didapatkan bahwa data lapangannya rata-rata sebesar 38%. Kecamatan Banyumanik sendiri sampah terangkut sebesar 27% setiap harinya. Pengangkutan sampah ini dilakukan setiap 1 minggu sekali dengan target 1x per kontainer menggunakan roll truck dan pickup sampah. Itu persentase per minggu 1 kali tampung muatan truck/pickup yang dapat mengangkut sampahnya. Jika dilihat dari persentasenya maka Kecamatan Banyumanik sendiri tingkat sampah yg terkelolanya masih cukup buruk karena sampah yang diangkut hanya 27% hal ini juga berkaitan dengan tingkat kontribusi bank sampah dalam mengurangi sampah serta kendala sarana prasarana tps yang masih sedikit.

Tabel 1.5

Fasilitas Sarana Prasarana Sampah di Kecamatan Banyumanik 2021

No	Nama TPS	Lokasi	Kontainer	TPS	Bank Sampah
1.	TPS Murbei	Kelurahan Sumurboto	2	2	3
2.	TPS Pasar Rasamala	Kelurahan Spondol Wetan	4	4	4
3.	TPS Pasar Spondol	Kelurahan Spondol Kulon	2	5	3
4.	TPS Pasar Banyumanik	Kelurahan Banyumanik	3	3	5
5.	TPS Gombel Lama	Kelurahan Ngesrep	2	3	3
6.	TPS Gedawang	Kelurahan Gedawang	1	1	1
7.	TPS Pudakpayung	Kelurahan Pudakpayung	2	2	2

Sumber : Dinas Kebersihan 2021

Berdasarkan Tabel 1.5 Fasilitas TPS Sampah di Kecamatan Banyumanik. Terlihat jelas bahwa Kelurahan Spondol Wetan yang paling banyak dalam jumlah kontainer 4 dan 4 TPS nya Sedangkan Kelurahan Gedawang yang paling sedikit TPS sampahnya hanya berjumlah 1 TPS dan 1 Kontainer. Sarana Prasarana TPS di Kelurahan Gedawang yang paling sedikit inilah yang perlu dibahas lebih lanjut dalam penelitian kali ini.

Pada Renstra DLH Kota Semarang Tahun 2016-2021 DLH berkewajiban untuk melakukan program dan kegiatan pada bidang lingkungan hidup berdasarkan kondisi di Kota Semarang. Renstra tersebut disusun pada tahun 2016 dan mengalami perubahan pada 2017. Pada Perubahan Renstra DLH ini DLH diberi ruang khusus dalam mengurus pengelolaan sampah. Ada beberapa poin yang ditangani oleh DLH yaitu pengelolaan sampah, sarana prasarana TPS, Bank Sampah.

Hal ini terkait dengan RPJMD Kota Semarang 2016-2021 dimana DLH diwajibkan untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Kota Semarang melalui Bank Sampah di setiap kelurahan minimal harus ada 1 untuk meningkatkan sarana prasarana TPS yang ada di Kota Semarang.

Dan juga Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah juga termasuk dalam koridor sasaran Pemerintah Kota Semarang dimana targetnya sarana prasarana tps dan bank sampah mengalami kenaikan yang signifikan dan mewujudkan Kota Semarang menjadi kota yang sehat dan bersih dari sampah.

Kecamatan Banyumanik memiliki beberapa kelurahan dan yang paling menarik kita bahas yaitu Kelurahan Gedawang. Karena Terdapat Kendala di Kelurahan Gedawang yaitu paling sedikit sarana prasarana TPS nya yang ada di Kecamatan Banyumanik hanya ada sekitar 1 TPS dan 1 Bank Sampah. Bank Sampah Gedawang Asri ini termasuk satu-satunya yang menerima sampah dan mengolah sampahnya di Kelurahan Gedawang. (Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2021)

Jika dilihat dari data itu maka Kelurahan Gedawang menjadi daya tarik sendiri dalam sistem pengolahan sampah di Kota Semarang. Namun kenyataannya, bank sampah ini belum terlihat jelas kontribusinya sebagai usaha pengelolaan dan pengurangan sampah di Kecamatan Banyumanik.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa Kelurahan Gedawang mempunyai bank sampah yg cukup buruk dan masih terbatas sarana prasarana dan juga masih terhambat pengelolaan sampahnya. Dari penjelasan diatas maka peneliti berminat untuk melaksanakan penelitian tentang **Bagaimana Implementasi Program Pengelolaan Persampahan di Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang?"**

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1 Sarana Prasarana dan TPS yang masih terbatas

1.2.2 Pengelolaan persampahan yang belum optimal di Kelurahan Gedawang

1.2.3 Minimnya kontribusi bank sampah dalam mengurangi sampah di Kelurahan Gedawang

1.3. Perumusan Masalah

1.3.1 Bagaimana Implementasi Program Pengelolaan Persampahan di Kelurahan Gedawang ?

1.3.2 Apa saja Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Pengelolaan Persampahan di Kelurahan Gedawang?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian akan memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1.4.1 Mendeskripsikan dan Menganalisis Implementasi Program Pengelolaan Persampahan di Kelurahan Gedawang

1.4.2 Mengetahui dan Mendeskripsikan Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Pengelolaan Persampahan di Kelurahan Gedawang.

1.5. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1.5.1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah pengetahuan tentang permasalahan sampah di perkotaan mengenai program pengelolaan persampahan.

1.5.2. Secara Praktis Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan peneliti dan menjadi masukan informasi bagi pihak lainnya mengenai Implementasi program pengelolaan persampahan di Kelurahan Gedawang.

1.6. Kerangka Teori

Kerangka Teori mengkaji dari pada sepotong sistematika yang bentuknya itu agak abstrak yang biasanya mempunyai keterkaitan antara jaringan-jaringan itu yang menolong kita disaat menyerap dari fenomena yang terjadi. Yang mana bisa dirincikan tentang suatu teori yang diibaratkan seperti sebuah rangka bangunan yang mengarahkan pengetahuan serta menyediakan bahan agar supaya bisa menjalankan ragam perilaku kedepannya. Pada alur studi mengenai administrasi publik berlaku pula konsep, teori dan analisis. Beberapa tokoh mengungkapkan konsep tentang administrasi publik. Administrasi publik dari kaca mata Prethus serta Pffifner adalah sebuah jaringan kerjasama yang diupayakan dari 1 orang serta kerumunan supaya dapat menjalankan pemerintah yg membuat kebijakan, Administrasi Publik juga mencontohkan pemberlakuan kebijakan negara yang udah dipermanenkan oleh dinas dan lembaga perwakilan politik.

1.6.1. Penelitian terdahulu

No	Pengarang/Jurusan/Tahun	Judul	Tujuan	Hasil/Temuan	Metode	Perbedaan
Pengelolaan Sampah						
1.	Imbar, Surianto. Master Tesis Universitas Terbuka. 2018	Implementasi Program Pengelolaan Sampah Di Kawasan Kota Takengon	Terdapat problematikaterhadap riset tersebut yaitu 1) Bagaimana implementasi program pengelolaan sampah di Kota Takengon; dan 2) Hal apa yang menyebabkanIndikator pendorong dan perlambatterhadap implementasi program pengelolaan sampah di Kota Takengon.	implementasi program pengelolaan sampah di Kota Takengon belum optimal ini diakibatkan dari sumber daya kurangmemadai untuk menyelesaikan problema sampah. Untuk sumber daya manusia masih kurang para pakar dalam aspek pendayagunaan sampah sehingga mengakibatkan kinerja implementasi program. Untuk Anggaran operasional belum cukup sementara masihbutuh untuk ditambahkan agardapat memperoleh tujuan dari program pengelolaan sampah di Kota Takengon. Selanjutnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah masih kurang yang berakibat pada tingkat pengelolaan tidak optimal dan mengakibatkan timbunan sampah di TPS. Faktor pendukung dari implementasi ini adalah adanya perda, undang-	Menggunakan metode deskriptif kualitatif data disajikan dalam bentuk uraian	Fenomena yang terjadi pada penelitian ini pengelolaan sampah di Takengon. Mengelola sampah domestik berdasarkan sarana prasarana di TPS dan Bank Sampah

				undang, perwali, dukungan dari Legislator, para stakeholders. Sedangkan penghambatnya adalah kurangnya tenaga ahli dalam pengelolaan sampah, kurangnya dana/anggaran kebersihan, kurangnya petugas kebersihan serta kurangnya kesadaran dan pasrtisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah.		
2	Tukiman, Teresia Retno Aryanti. Ilmu Administrasi Negara UPN Veteran Jawa Timur. 2017	IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN BANK SAMPAH (STUDI DI BANK SAMPAH “SALING ASIH” DESA LARANGAN KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO)	Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kondisi pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat yang dihadapi dalam penerapan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat. Data yang didapat selanjutnya digunakan untuk merumuskan strategi alternatif yang dapat digunakan dalam pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat.	Hasil penelitian yang ditemukan dilapangan menunjukan bahwa faktor pendukung penerapan pengelolaan sampah terpadu meliputi adanya dukungan politik, baik dari DPRD Kota maupun Walikota dan keterlibatan <i>Stakeholder</i> . Faktor penghambat penerapan pengelolaan smapah terpadu meliputi belum adanya regulasi lokal yang menguatkan penerapan pengelolaan sampah, peran serta masyarakat bersifat pasif belum aktif terlibat dalam pemilahan sampah,	Menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui data di lapangan tentang pengelolaan sampah	Pengelolaan sampah yang ada belum berjalan secara maksimal dikarenakan sarana prasarana yang belum memadai

				terkendala pemasaran hasil produksi, konsep swakelola tidak seperti yang diharapkan. Dari hasil uji litmus, isu strategis dalam pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat adalah meningkatkan kapasitas sumber daya dalam upaya mengubah persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.		
3.	Azizah Ulfa dan Marom AUFARUL Departemen Ilmu Administrasi Publik Sarjana Universitas Diponegoro. 2016	IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS KOMUNITAS DI KELURAHAN SAMBIROTO KECAMATAN TEMBALAN G KOTA SEMARANG	Penelitian ini bertujuan: 1) mendeskripsikan implementasi program pengelolaan sampah berdasarkan komunitas di Sambiroto ;	Penemuan berbagai hambatan pada proses pelaksanaannya ada tahapan penyelesaian sebagai cara mengatasinya bentuknya yaitu : 1. Swadaya Penggagas Ketua KSM Sampah 2. Retribusi Sampah 3. Memaksimalkan Sarana dan Prasarana yang mendukung Kegiatan persampahan 4. Bank sampah terkait pengurangan sampah 5. perbaikan tps yang ada	Menggunakan metode narasi deskriptif yaitu narasumber yang menjadi pokok temuan data di lapangan	Terdapat temuan bahwa pelaksanaan program pengelolaan sampah di dasarkan pada komunitas setempat atau lembaga swadaya masyarakat yang menjadi pokok pembahasan

Pengelolaan Sampah

4.	Rostyaningsih Dewi,	Implementasi Kebijakan	Tujuannya untuk mengurangi timbunan	Hasil Penelitian ini menunjukkan	Menggunakan metode deskriptif	Menguraikan tentang Perda
----	---------------------	------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---------------------------

	YulistiaGusrini, Suryaningsih Margareth.J urusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2015	Pengelolaan Sampah Kota Semarang menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah	sampah yg menumpuk di tempat pembuangan akhir	bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah belum sepenuhnya berhasil untuk mengurangi jumlah timbulan sampah yang ada	kualitatif disajikan dalam bentuk uraian	Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah yg dijelaskan bahwa di setiap kelurahan wajib memiliki 1 bank sampah dan 1 tps
5.	Syafrudin, Kismartini, SaputroYusa Eko. Mahasiswa Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro. 2015	Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat melalui Bank Sampah	Memahami tentang analisis terkait bank sampah terhadap kelompok peduli lingkungan di kelurahan sidomulyo	Menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan mampu mengolah sampah secara benar	Menggunakan metode deskriptif kualitatif dan dijabarkan melalui uraian	Mengelola sampah menggunakan bank sampah sebagai upaya mengurangi sampah tentunya di dukung oleh sarana prasarana dari TPS yang mencukupi
Bank Sampah						
6.	Bertha Maya Sopha, Halim Qista Karima. Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Gajah Mada. 2020	Pengembangan Model dan Simulasi Berbasis Agen untuk Adopsi Layanan Bank Sampah di Kota Semarang	Pemerintah kota semarang menciptakan bank sampah diberbagai titik yg bertujuan untuk menekan jumlah sampah di pembuangan akhir	menghasilkan 93% partisipasi rumah tangga dalam mengelola sampah dan 2,4 ton sampah yang dikumpulkan hingga periode ke 60 minggu	Metode deskriptif kualitatif yang mana penjelasannya menggunakan dokumentasi dan narasumber yang ada di lapangan	Bank sampah menjadi kunci dalam penurunan laju sampah di TPA karena sampah yang ada di TPS sedikit karena dikelola oleh bank sampah
7.	Gatot Murti Wibowo, Sri Mulyati, Emi Murniati, Jeffri Ardiyanto. Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Poltekkes	Pendampingan Pembentukan Bank Sampah di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Semarang	Membuat wadah / sarana prasaranabank sampah untuk mengurangi polusi sampah	Masyarakat memandang masalah sampah menjadi hal yang patut diprioritaskan mengingat pengelolaan sampah melalui bank sampah dapat berimbas baik secara ekonomi	Metode deskriptif kualitatif dengan teknik probability sampling dengan pendekatan implementasi program	Bank sampah memiliki peran penting dalam mengurangi polusi sampah dan berimbas pada pemanfaatan sumber daya secara optimal

	Kemenkes Semarang. 2019					
8.	Bimasatyaji surya ramadhan, Junaidi, syafrudin. Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro. 2019	Inisiasi Pembentukan Bank Sampah di RT 03 RW 03 Kelurahan Gedawang Kota Semarang	Menginisiasi pendirian bank sampah dan pengelolaannya secara lebih lanjut	meningkatkan reduksi sampah di tingkat rumah tangga secara efektif serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara simultan		
9.	Rosmita. Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar. 2020	Implementasi Program Bank Sampah Pusat di Kelurahan Palopo Kota Makassar	Program bank sampah yang dalam penerapannya menggunakan 3 R Reduce, Reuse, Recycle	Kelurahan Palopo memiliki 4 bank sampah dengan jumlah penabung 320 penabung	Menggunakan metode kualitatif dan data dokumentasi dilapangan	
10.	Teuku Afrizal, Syahnaz Vindi Setyarini, Ari Subowo. 2020	Program Bank Sampah dalam Upaya Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Semarang (Studi di Bank Sampah Soka Resik, Dusun Soka, Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang)	Tujuannya untuk mengurangi sampah dan melanjutkan program bank sampah secara berkelanjutan	menemukan bahwa program Bank Sampah telah mengurangi jumlah sampah yang dibuang di TPS dan mencatat tumpukan sampah anorganik yang dikelola.	Menggunakan metode deskriptif kualitatif yang didasarkan pada data temuan di lapangan	TPS dan Bank Sampah menjadi solusi dalam peningkatan pembangunan berkelanjutan dan menambah kualitas sampah yg terkelola

Riset pendahulu menjadi faktor pendorong dari semua penelitian yang baru karena penelitian-penelitian lama itu dipakai sebagai patokan serta tolak ukur untuk menjalankan implementasi serta deskripsi. Berbagai penelitian tentang Program Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah sudah dijalankan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Dari banyaknya penelitian terdahulu tersebut, peneliti menjadikan penelitian yang dilaksanakan oleh Imbar, Suriyanto yang berjudul “Implementasi Program Pengelolaan Sampah Di Kawasan

Kota Takengon” sebagai acuan dalam penelitian peneliti. Hal tersebut dikarenakan penelitian tersebut mempunyai kemiripan dalam menggunakan metode penelitian yaitu kualitatif namun salah satu variabel yang dipakai memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti.

1.6.2. Administrasi publik

Administrasi Publik yang lingkungannya pada wilayah Indonesia patokannya tidak dari pola yg modern, penyebabnya dari pemahaman administrasi publik udah ada dari lama, kebanyakan pencetus merubah sebutan administrasi publik jadi istilah keren yaitu adminstrasi negara Menurut Prajudi Atmosudirdjodalam W.Firdaus (2007:30) mengatakan mengenai Administrasi Publik yaitukemunculan kejadian sosial, bentuknya itu abtrak pada tatannan warga baru. Kehadrian munculnya administrasi ini berhubungan dengan lembaga, maksudnya itu yaitu pada suatu lembaga pasti ada administrasi. Kemudian siapapun yg mempunyai keinginan memahami munculnya administrasi yang ada di warga lokal harus diperdalam lagi badannya yang masih ada, disana administrasi hadir. Menurut Gulick dalam Yeremias T. Keban (2014:32)mengatakan bahwa administrasi publik berkaitan dengan penyelesaian hal apa yang hendak dikerjakan dengan tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan PandanganGulickyang ditulis oleh Yeremias T. Keban (2014:32)yaitu administrasi itu memakai pola disiplin ilmu yang mana warganya bisa paham keterkaitn-keterkaitan, memprediksi kejadian yang biasanya akan kejadian dan memengaruhi temuan-temuan dari kondisi yang mana warga saling kerjasama untuk tercapainya kata mufakat.

Gerald E. Caiden dalam Yeremias T. Keban (2002:15-16) menulis sebuah buah pikir yang dituangkan ke sebuah buku ataaau dokumen Public Administration membuat sebuah pedoman tentang memprediksi tentang lembaga yang ada dalam pemerintah, yaitu memandang 3 macam isinya mengenai badan yang diciptakan oleh yang diatur pemerintah, pekerjajanya dinamakan aparatur sipil negara, serta anggarannya itu sumbernya dari patungan warga. Meskipun itu setidaknya terdapat 7 wujud unik yang ada di Administrasi Publik yang tidak bisa dihindarkan, berharap dari perwujudan kepatuhan, mempunyai priorita, memakai pengkhususan, pucuk politik pengendali, susah sekali diprediksi jadi jangan berharap lebih dari administrasi publik

1.6.2.1 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma merupakan budayapikir seseorang atau sekelompok orang yang tidak dapat dilepaskan dari karakter ilmu pengetahuan itu sendiri yang sifatnya nisbi, meskipun salah satu persyaratan harus dapat diterima secara keseluruhan, namun dalam jangka waktu tertentu masih membutuhkan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Menurut Robert T. Golembiewski dalam N. Henry (1995:21-49) mengira tentang suatu pondasi pengetahuan dipantau dari fokus dan sasarannya. Fokusnya membahas tentang bahasan hal dan bagaimana caranya menemukan solusi dari sebuah masalah. Dan sasarannya membahas seputar tempat yang pas untuk menerapkan ilmunya.

1.6.3 Perkembangan Paradigma

a. Paradigma I Dikotomi Politik Administrasi (1900 – 1926)

Pemeran Utama dari paradig tersebut dua orang Leonard D. White dan Fran J. Goodnow. Goodnow mengatakan pada buah penulissannya tentang “*Politik dan Administrasi*” dalam Yeremias Keenan ketika tahun (1900:32) menjelaskan bidang mencakup politik itu perlu mengutamakan konsentrasinya dengan putusan serta gaya yang asalnya kemauan masyarakat, sementara administrasi memberikan konsentrasi penuhnya dari perlakuannya atau pelaksanaan dari putusan atau keinginan itu. Pemisahan Politik dengan Administrasi diinvestasikan oleh pemisahan lembaga legislatif yang mempunyai tugas mengekspresikan kehendak rakyat, dengan lembaga eksekutif yang mempunyai tugas mengimplementasikan kemauan tersebut. Lembaga Yudikatif dalam hal ini mempunyai fungsi membantu lembaga legislative dalam memutuskan tujuan dan merumuskan kebijakan. Implikasi dari paradig tersebut yaitu bahwa administrasi harus dilihat suatu bebas nilai, dan diarahkan untuk memperoleh nilai efisien dan ekonomi dari bureaucracy government. Namun biasanya paradig ini hanya diutamakan pada bidang locusnya aja itulah birokrasi pemerintahan. Sementara pola dari pengembangan pada administrasi public gak terlalu didalami dengan gamblang.

b. Paradigma II Prinsip-prinsip Administrasi (1927 – 1937)

Pemeran utama dalam paradig ini yaitu Henry Fayol, Wiloughby Lyndall Urwick, Marry Parker Follet, yang biasa dikenal dengan istilah “*POSDCORB*” dan lain lain. Dari kehadiran

dari buku karangan “Wiloughby” mempunyai tema “*Principles of Public Administration*”, isunya bertafsirkan mengenai pedoman-pedoman administrasi yang biasanya menyeluruh bisa ditemui segala waktu. Mereka 3 tokoh diatas yang merepresentasikan prinsip administrasi sebagai fokus administrasi public. Sementara locus dari administrasi public tak riil dijelaskan dengan gambling karena mereka menganggap pedoman itu bisa ditemukan manapun yang ada pada lembaga negara. Paradigma itu menitikberatkan pada Locusnya.

c. Paradigma III Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950 – 1970)

Marx Morstin penulis karya “*Elements of Public Administration*” dalam Yeremias T. Keban pada tahun (1946:32) mencoba menanyakan antara politik yang menjauh dengan administrasi yang dipandang dalam hal mustahil atau tak sesuai dengan realita, dan menurut Herbert Simon dalam A.Alamsyah (2013:8-9) tentang kritiknya pada keragu-raguan pandangan administrasi, serta mempunyai nilai mengenai pedoman itu tak akan terjadi secara menyeluruh. Pada Konteks tersebut, Administrasi Negara bukanlah “*value free*” dapat dilakukan dimana saja, namun selalu disebabkan nilai-nilai sesuatu hal. Disitu kejadian perselisihan dengan maksud tentang “*value free administration*” di suatu golongan mempunyai maksud akan “*value-laden politics*” di pihak lain. Dalam penerapannya ternyata maksud kedua yang dijalankan, makanya John Gaus dalam Yeremias T.Keban (2014:44) dengan percaya diri menjelaskan bahwa teori administrasi public sebenarnya juga teori tentang politik. Dampaknya kehadiran paradigam modern yang beranggapan bahwa administrasi negara itu adalah politik pengetahuan yang mana lokusnya yaitu birokrat pemerintahan, sementara targetnya berubah samar karena pedoman administrasi negara berisi kekurangan. Mereka banyak mengkritik pada prinsip administrasi namun tidak memberikan solusi dari masalah yang digunakan pada administrasi public. Pada saat itu administrasi public sedang terjadi krisis identitas karena lebih dominan ilmu politiknya dari pada Administrasi Publiknya.

d. Paradigma IV Administrasi Negara Sebagai Ilmu Administrasi (1956 – 1970)

Pada Paradigmaterdapat manajemen pedoman sebelumnya sudah terkenal dan dipaparkan lagi secara lebih detail dan mendalam. Sikap lembaga, analisis manajemen, praktek teknologi baru contohnya teknik analisis pola, kuantitatif dan pengkajian lebih dalam adalah fokus dari paradigam itu. Alu kemajuan paradigam tersebut tertuju pada pengetahuan administrasi

alami yang didorong dari pengetahuan sosial psikolog, serta mempunyai pandangan tentang kebijakan public. Keseluruhan fokus yang diperbaharui dapat mengistilahkan tak melulu soal keuangan namun juga padaruang administrasi public. Jadi hal ini lokusnya berubah samar-samar.

e. Paradigma V Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970 – sekarang)

Menurut pendapat *Gerald E. Caiden* dalam *Zauhar Susilo*(1982:14-15), yang mendefinisikan ada banyak ragam dalam administrasi public merupakan jalan sistem administratif, aliran pengalaman, aliran tindakan orang, aliran sistem sosial, aliran hitungan, aliran analisis birokrasi, aliran pengambilan keputusan, aliran integrative. Caiden membagi aliran tersebut dari dua golongan yaitu aliran sistem administrasi dan aliran proses administrasi yang termasuk aliran pengambilan keputusan, aliran empiris, aliran matematik (Caiden, 1982: 212-222). Paradigma itu sudah mempunyai fokus dan lokus gak gamblang. Fokus administrasi public dari paradigm kali ini merupakan manajemen konsep, publik kebijakan, teori organisasi, sementara itu lokusnya kepentingan dan problema publik.

1.6.4 Konsep Kebijakan Publik

Menurut Shafritz dan Russell dalam *Keban* (1997:47) mengumandangkan penjelasan dari kebijakan publik gampang dipahami serta sangat sederhana adalah “*whatever a government decides to do or not to do.*” Kedua penulis mengatakan bahwa hal yang akan dikerjakan ini adalah tanggapan kepada sebuah isu politik. Sementara itu Peterson dalam Agus Subianto (2003:10-11) mengatakan bahwa keputusan publik dari ragam keseluruhan terpantau bentuk sikap pemerintah pada mengantisipasi problema, serta mendorong pemusatan kepada “*apa memperoleh siapa, bagaimana serta kapan*”. Peterson dalam Agus Subianto (2003:12-13) Menjelaskan Definisi Kebijakan public yang dikemukakan James Anderson dalam Budi Winarno (2008:20-21) adalah “*a relatively stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.*”

Pada mekanisme kebijakan publik masih ada beberapa langkah, menurut James Anderson dalam Budi Winarno (2008:20-21) menjelaskannya ke kebijakan publik seperti inilah,

A. Problema Formulasi: Masalahnyaitu Apa? Hal apa menjadikan sebagai sebuah problema kebijakan? Dari mana problema itubisa memasuki

B. Kebijakan Formulasi bagaimana mendeskripsikan opsi atau jalan pintas untuk menyelesaikan masalah itu? Siapa yang mendukung pada kebijakan formulasi?

C. Pemilihan Kebijakan : Bagaimana Solusi yang dilakukan ? ciri-ciri atau karakter bentuknya apa yang wajib dituruti ? Tokoh mana menjalankan keputusan ? Bagaimanasih perjalanandan taktik untuk menjalankan keputusan ? Apasih kandungan dari keputusan yang diputuskan ?

D. Implementasi : Tokoh mana yang berkaitan pada Implementasi kebijakan? Mereka ngerjain apa sih? Kejadian yang timbul dari hasil keputusan ?

E. Evaluasi : Bagaimana level kesuksesan atau pengaruh keputusan yang dipakai ? Tokoh mana yang mengevaluasi dari hasil kebijakan? Hal apa yang terjadi apabila evaluasi kebijakan dilakukan? Apakah muncul sanksi atas pembatalan?

Ucapan Thomas R. Dyeyang ditulis oleh Solichin (2012:16-17), Kebijakan Publik juga bisa membuat dampak pada mekanisme kebijakan publik padapatokantanggungjawabnya itu. Hal tersebut diakibatkan dari adanya tanggungjawab yang dipakai Pemerintah oleh karena itu.

1. Cuma pemerintah yang memiliki semangat serta skill agar keberjalanan kebijakan public dengan menyeluruh terhadap public yang merupakan targetnya
2. Cuma pemerintah yang memiliki semangat atau skill pada hal legitimasi dan memutuskankeputusan public menjadi bisa dilaksanakan denganmendunia kepada public yang merupakan targetnya
3. Cuma pemerintah yang memiliki power dan skill untuk mengerjakan kebijakan public secara paksa kepada public yang menjadi target

Berdasarkan uraian diatas dari pendapat beberapa tokoh mengenal proses kebijakan publik. Pertimbangan yang berhubungan dengan “*who gets what, when, how*” merupakan ungkapan dari H.Lasswell dalam Solichin pada (1936:7) dan sangat terkenal sampai saat ini, mewarnai keputusan atau output dalam proses kebijakan

Kebijakan publik apabila pernah ditetapkan tidak bisa berguna jika tak dikerjakan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan problema ada beragam langkah penting misalnya (Dunn,2004) memutuskan jadwal kebijakan, formulasi kebijakan, memelihara kebijakan, implementasi kebijakan, sertamembuat nilai kebijakan.

1.6.5 Konsep Implementasi

Konsep Implementasi memaparkan suatu tahapan dimana kebijakan yang sudah diterapkan dapat dilakukan oleh perangkat-perangkat administrative tertentu dengan menggerakkan anggaran dan energi yang ada. Pada level ini, proses pengawasan mulai dilaksanakan. Dan level terakhir yaitu level penilaian kebijakan dimana beragam alat yang sudah diperkirakan melaksanakan penilaian mengenai apakah semua proses implementasi telah sesuai dengan apa yang sudah diperkirakan. Dalam proses ini evaluasi kebijakan dapat dilaksanakan.

Pada Prinsipnya ada lima ketepatan yang dapat dimengerti pada maksud peringkasan implementasi suatu kebijakan, sementara kami bisa menilai kebijakan itu telah berkaitan dan praktiskah (Rian Nugroho, 2011). Kelima ketepatan itu yaitu :

1. Ketepatan Program

Seberapa efektifkah program tersebut dalam memecahkan masalah seperti *How excellent is the policy*

2. Ketepatan Pelaksanaan

Ada aktor implementasi kebijakan yang dapat melaksanakan implementasi kebijakan yaitu lembaga dengan masyarakat, non negeri dan lembaga, maupun implementasi kebijakan berubah jadi non negeri. Implementasi ini cenderung bersifat memberdayakan.

3. Ketepatan Sasaran

Sasaran harus sepadan berkaitan implementasi kebijakan , target bersedia diintervensi mengenai implementasi kebijakan atau tidak, siapkah dalam berbagai kondisi serta efisien atau tidak

4. Ketepatan Lingkungan

Lingkungan kebijakan sesuaikah atau tidak dengan implementasi kebijakan serta lingkungan eksternal kebijakan mempunyai variable yang sesuai dengan implementasi programnya

5. Ketepatan Proses

Kebijakan dapat diterima kebijakan dapat diadopsi dan kebijakan berhubungan dengan pembacaan strategi dan kondisi proses implementasi kebijakannya.

Pada pokok permasalahannya sesuatu implementasi yaitu bagaimana sebuah kebijakan dapat diterapkan atau dibuat sepadan dengan sumber daya yang ada. Demi mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kontrol dari sebuah implementasi yang setelah dilakukan kemudian dievaluasi. Untuk menjalankan sebuah implementasi kebijakan, banyak sebab-sebab yang dapat mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan untuk melihat kebijakan itu sudah berjalan dengan benar atau salah.

Menurut Edward III dalam Sutarmin (2016) yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan efektif jika diperoleh dari adanya struktur organisasi, sumber daya, komunikasi, sikap atau disposisi. Sumberdaya yang ada juga diperlukan untuk menjalankan kebijakan, dengan terdapat struktur organisasi untuk melakukan kebijakan, komunikasi juga berhubungan dengan publik dan organisasi, tanggap dan sikap dari pihak yang berkecimpung dan sumberdaya berkenaan dengan adanya sumber daya pendorong terkhusus tenaga manusia.

Menurut Van Meter Van Horn dalam Agustino (2008) menjelaskan tentang implementasi kebijakan yaitu sesuatu perilaku sikap yang dikerjakan dari kelompok ataupun individu dan pegawai-pegawai pemerintah serta swasta yang dijuruskan untuk terkabulnya tujuan yang sudah direncanakan dari sebuah keputusan kebijaksanaan, dia meyakinkan bahwa proses implementasi bisa terjalankan semasa mekanisme pengesahan dijalankan dan pemindahan sumber daya, keuangan yang sudah disetujui namun tidak sesuai dengan awal dimulai pada saat sasaran dan tujuan kebijakan diregulasikan, tetapi pada tahap implementasi.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Priska, Y (2018). Menguraikan bahwa implementasi itu menyatakan bahwa: mendalami hal atau aktifitas yang telah terjadi dari sebuah program yang sudah ada dan dijalankan dan menjadi fokus perhatian dari implementasi kebijakan, yakni aktifitas-aktifitas dan segala hal yg terjadi muncul dari diresmikannya kebijakan

negara, yang meliputi upaya-upaya untuk mengimplementasikannya ataupun memunculkan akar masalah yang terjadi maupun solusinya.

Sesudah membahas mengenai konsep implementasi kebijakan publik maka pada tahap selanjutnya dijelaskan model-model implementasi kebijakan publik yang dikenalkan dari: Model Van Meter Van Horn, Model Edward III, Model Mazmanian & Sabatier.

1.6.5.1 Model Implementasi menurut Van Meter Van Horn

Implementasi Kebijakan merupakan metode yang dilakukan untuk sebuah kebijakan dapat mencapai prose kebijakannya dan tujuan kebijakannya. Menurut Van Meter Van Horn dalam Yermias T. Keban (1974:22) Implementasi Kebijakan merupakan suatu model top down yang mana semuanya saling berkaitan dari beberapa analisis kebijakan, implementasi kebijakan, perhatian langsung pada faktor penentu dari kebijakan publik dan juga dampak dari kebijakan itu sendiri. Van Meter Van Horn juga menjelaskan antara performa dengan kebijakan.

Model Van Meter Van Horn dalam Yermias T. Keban (1974:22) meliputi enam komponen :

1. Sebuah Lingkungan yang secara berkelompok atau gabungan menstimulasi pejabat pemerintah dan menerima barang dari pekerjaan mereka.
2. Tuntutan dan Sumber Daya yang membawa stimulasi dari lingkungan kepada pembuat kebijakan.
3. Sebuah proses konvensi, meliputi struktur dan tata cara formal dari pejabat institusi.
4. Kebijakan yang mewakili tujuan, atensi atau jawaban resmi dari pejabat pemerintah
5. Tenaga Kebijakan sebagaimana dia seharusnya diberikan kepada narasumber
6. Umpan balik dari kebijakan dan kekuatan kepada lingkungan, yang ditransmisikan kembali kepada proses pemindahan seperti perintah dan energy pada jaman selanjutnya.

Variabel lingkungan implementasi terkait 3 hal :

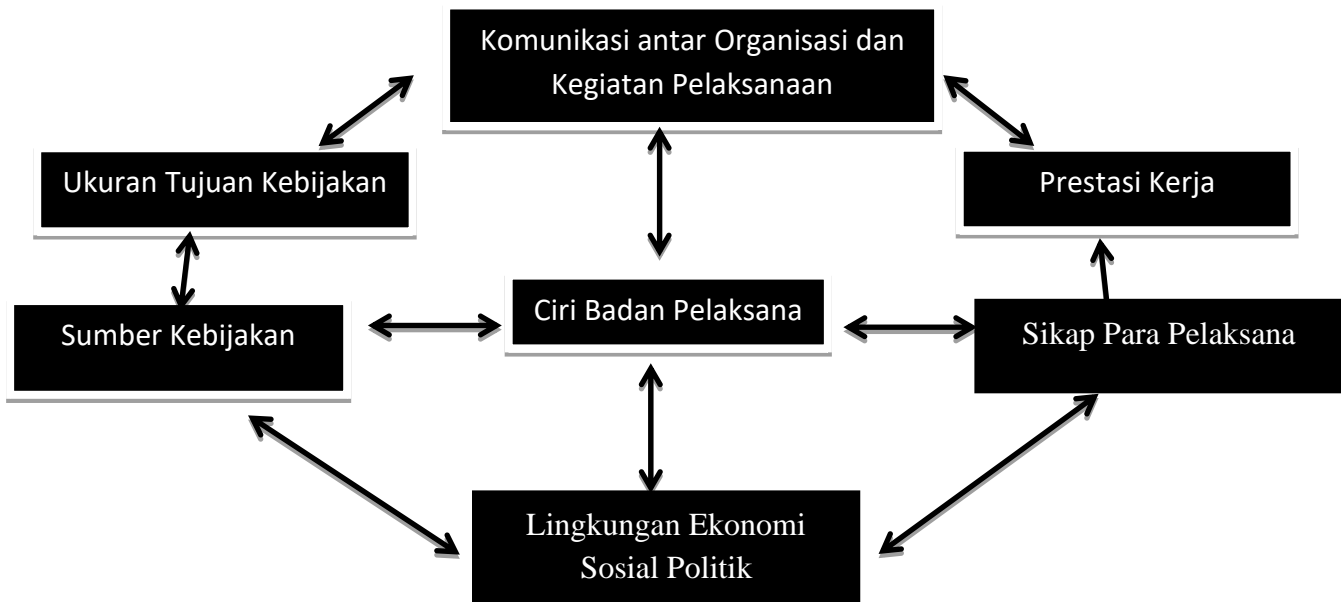
- a) Komunikasi antar masyarakat dengan organisasi pemerintah dalam perannya dengan implementasi kebijakan
- b) Standar dan ukuran tujuan kebijakan serta sumber kebijakannya;

c) perilaku dari golongan publik atau perseorangan dari privat yang memperhatikan lingkungan ekonomi sosial dan politiknya.

Model Implementasi yang diuraikan oleh Van Meter Van Horn dapat dilihat pada kerangka gambar berikut:

Gambar 1.6.5.1

(Model Proses Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter Van Horn)



Sumber : Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, 1991: 66

Model proses implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn dalam Solichin A. Wahab (1991) juga sering dikenal dengan Model Implementasi Kebijakan. Alur implementasi ini yaitu sebagai mekanisme sesuatu abstraksi pada sebuah penggambaran kebijakan yang sumbernya dapat mencapai tujuan kinerja implementasi kebijakan yang kuat yang berhubungan dengan beragam variabel. Model ini memberikan arahan bahwa pada implementasi kebijakan bisa berjalan dengan optimal dari hasil putusan politik, kinerja dan pelaksana kebijakan publik

Secara gamblang variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dalam Solichin A. Wahab (1974) diperjelas dengan sebagai berikut:

1) Standard dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan

Tingkat kapabilitas implementasi kebijakan dihitung dari level kesuksesannya dan juga pengukuran dan pencapaian kebijakan yang mempunyai sifat sesuai dengan fakta dan budaya masyarakat yang terdapat di tingkatan pelaku kebijakan. Ketika target dan pengukuran terlalu ideal juga tidak bagus bagi kebijakan karena susah dijalankan.

Logika mengenai sasaran dan standar untuk mencapai kebijakan adalah paling penting. Implementasi kebijakan dipengaruhi dari tingkah laku para pelaksana karena itulah yang merupakan titik krusial dan mereka harus paham tentang sasaran dan standar tujuan kebijakan apabila tidak paham maka mereka akan gagal menjalankan kebijakan.

2) Sumberdaya

Sumber daya sendiri terdiri atas manusia dan keuangan apabila sumber daya manusianya bagus maka itulah yang menjadi penentu keberhasilan sebuah implementasi kebijakan dan apabila sumber keuangannya bagus maka memperlancar kinerja dalam implementasi sebuah kebijakan. Minimnya dana juga berpengaruh negatif pada sebuah kegagalan implementasi kebijakan tersebut.

3) Karakteristik Organisasi Pelaksana

Yang dimaksud disini adalah seorang implementor atau agen pelaksana dari sebuah kebijakan. Mereka mempunyai dua cabang organisasi yaitu formal dan informal. Hal ini modal utama karena dapat memengaruhi suatu implementasi kebijakan. Karena seorang agen kebijakan wajib mengajak dan demokratis dalam mensukseskan sebuah implementasi kebijakan. Dan pemahaman dari segi kewilayahan juga penentu dari keberhasilan agen pelaksana kebijakan.

Ada dua tipe pelaksana organisasi pada karakter utama dari sebuah struktur birokrasi yaitu sistematisasi kerja yang biasa disebut SOP (Standard Operating Procedures) dan fragmentasi (Edward III, 1980).

a) Standard Operating Procedures

b) Fragmentasi

4) Komunikasi antar lembaga yang berhubungan dan sebuah aktifitas pelaksanaan

Keberhasilan suatu organisasi juga ditentukan dari segala macam kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi publik. Ada yang sengaja mengalami gangguan dan

diperlambat dan ada yang sengaja dipercepat agar sebuah kebijakan dapat berjalan dengan cepat dan sesuai dengan regulasi yang ada.

5) Disposisi

Harus sesuai sikap pelaksana kebijakan dengan kebijakan yang mereka buat karena berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab dari seorang pelaksana kebijakan. Mereka juga harus paham dan memberikan pengaruh ada sebuah kebijakan. Mereka juga berhak menentukan sikap menjadi pihak yang netral, pendukung, ataupun kontra. Perlu juga diadakan yang benar mana yang salah dalam menentukan sebuah kebijakan

6) Lingkungan Politik, Ekonomi, Sosial

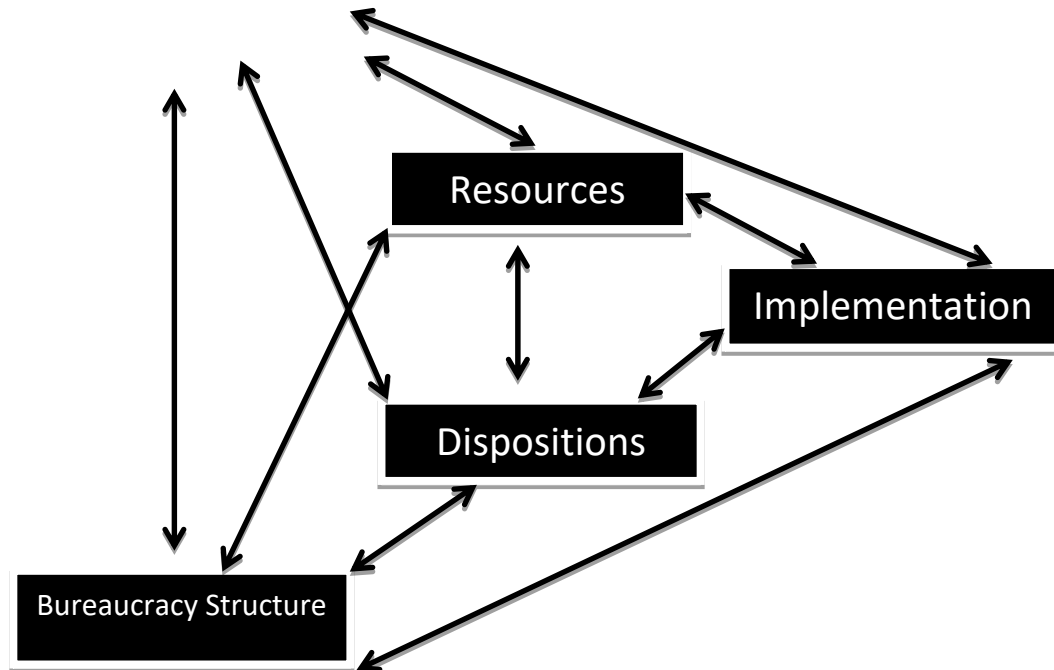
Adaptasi lingkungan ekonomi , sosial dan politik juga wajib dijalankan agar dapat berjalan dengan optimal. Tentu hal ini juga mempengaruhi dari sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan. Mengimplementasikan sebuah kebijakan tentu tidaklah mudah karena tergantung dari lingkungannya dan perilaku dari pelaksana kebijakannya

1.6.5.2 Model Implementasi menurut George C. Edward III

Menurut Edward III dalam Sutarmin (1984:9-10) yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan efektif jika diperoleh dari adanya struktur organisasi, sumber daya, komunikasi, sikap atau disposisi. Sumberdaya yang ada juga diperlukan untuk menjalankan kebijakan, dengan terdapat struktur organisasi untuk melakukan kebijakan, komunikasi juga berhubungan dengan publik dan organisasi, tanggap dan sikap dari pihak yang berkecimpung dan sumberdaya berkenaan dengan adanya sumber daya pendorong terkhusus tenaga manusia. Edward III dalam Sutarmin (1984:9-10) memandang dari empat pokok bahasan yang perlu dipahami dalam kerangka model implementasi yang tergambar sebagai berikut:

Gambar 1.6.5.2 (Model Pendekatan Direct and Indirect Impact Implementation Menurut George Edward III)

Communication



Sumber : Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, 1991: 66

Model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III dalam Solichin A. Wahab (1991:66) memuat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan Empat variabel tersebut diantaranya adalah :

a. Komunikasi

Komunikasi menjadi penentu dari kesuksesan tercapainya tujuan dari impelentasi kebijakan publik. Impelentasi yang praktisdapat dilakukan jikaa pejabat pemangku kebijakantelah memahamibanyak hal yang dapatdilaksanakan. Wawasandari hal yang dapat mereka selesaikan dapat terlaksana dengan lancarjika komunikasi dilakukansecara benar, sementara setiap hasil dari kebijakan dan regulasipelaksanaan harus dikonversikanatau dihubungkanterhadapanggota personalia yang benar. Kebijakan yang dibicarakan harus tepat, akurat dan mandiri.

b. Sumber Daya

Meskipun kandunganKeputusan telah dibicarakan dengan baik dan benar, namunjika petugas pelaksana membutuhkan sumber daya untuk mengerjakan perintahitu, sehinggapelaksanaan tidak dilakukan dengan lancar. Sumber daya itu dapat berbentuk sumber daya manusia, yaitupersaingan petugas pelaksana, dan sumber daya keuangan.

Sumber daya merupakan indikator utama dalam hal implementasi kebijakan supaya terwujud program secara lancar.

c. Disposisi

Perilaku Disposisi merupakan karakter atau sifat yang digunakan oleh pejabat petugas pelaksana kebijakan, misalnya : demokratis, kerja keras, komitmen, rajin, kejujuran, disiplin. Disposisi dari implementor kebijakan publik merupakan indikator utama untuk pendekatan tentang pengerjaan kebijakan publik. Apabila pengerjaan sebuah kebijakan dapat terealisasi yang dibutuhkan implementor tak hanya melihat saja namun memiliki skill untuk mengerjakan kebijakan yang tersedia.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang mempunyai tanggung jawab dalam hal menjalankan keputusan mempunyai dampak penting untuk pelaksanaan kebijakan. Salah satu dari indikator susunan yang paling utama dari semua lembaga yaitu cara pengoperasian yang menjadi dasar (SOP), SOP itu sendiri syarat terpenting untuk sumber daya manusia dapat melaksanakan kegiatannya mengenai hubungannya dengan proses implementasi.

1.6.5.3 Model Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier

Gambar 1.6.5.3

(Model Proses Implementasi Kebijakan Menurut Mazmanian dan Sabatier)



Sumber : Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, 1991: 66

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Priska, Y (2018) terdapat 3 Variabel implementasi :

1. Variabel Independen

Sulit atau tidaknya masalah dikelola yang berkaitan dengan indikator :

- problematik teknis dan
- pengerjaan pada sasaran
- keanekaragaman objek,
- perubahan pada apa yang akan dikehendaki.

2. Variabel Dependen

Merupakan bagian dari proses implementasi kebijakan publik terdiri dari 5 bagian yaitu :

- Pemahaman dari organisasi yang menjalankan pada bentuk dirancangnya kebijakan pelaksana
- Disiplin Objek
- Temuan Nyata
- Menerima dari Hasil Temuan
- Bagian yang menjurus pada membenaran dari pada kebijakan yang dirancang dan dikerjakan, dari awal hingga akhir kebijakan yang sifatnya mendasar

3. Variabel Intervening

Mempunyai maksud sebagai pemahaman kebijakan dalam mengorganisasikan proses implementasi dengan indikator

- Fakta dan konsisten pada tujuan,
- keserasian hierarkis,
- tepat sasaran alokasi anggaran,
- regulasi pelaksana,
- mengrekrut pejabat yg menjalankan,
- keterbukaan dengan eksternal

Variabel diluar kebijakan yang memengaruhi alur implementasi yang berhubungan dengan indikator situasi sosial-ekonomi dan teknologi, tindakan, dukungan publik, dukungan pejabat kuat, dan komitmen dari kepemimpinan yang berkualitas pada pejabat yang melaksanakan

1.6.6 Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengenai Pengelolaan Sampah. Sampah merupakan sisa dari aktivitas sehari-hari seseorang atau proses alamiah yang bentuknya padat. sementara, Pengelolaan Sampah merupakan usaha yang sistematis, keseluruhan, dan saling berkelanjutan yang misalnya pengurangan pemakaian sampah. Pengelolaan Sampah tidak hanya bidang teknis, tetapi juga mencakup bidang-bidang lainnya, misal manajemen, aturan, keterlibatan masyarakat, pembiayaan, penghasil sampah, dan pihak swasta.

Pada negara modern, pengelolaan sampah banyak diartikan sebagai pengendali terhadap timbulan sampah, mulai dari tempatnya, pengambilannya, pemisahan, penampungannya, pemrosesannya, hingga pembuangan akhir dengan pengelolaan terbaik untuk ekonomi, lingkungan, kesehatan, estetika, konservasi, teknis, dan pada perilaku masyarakat.

Keberhasilan pengelolaan sampah tidak cuma dari bidang teknis, namun juga bidang nonteknis. Untuk melakukan sistem penanganan yang benar, membutuhkan beragam disiplin ilmu, misalnya perencanaan kota, kesehatan, ekonomi, sosiologi, teknik sipil, konservasi, komunikasi.

1.6.7 Bank Sampah

Bank Sampah adalah sebangkah mekanisme dari pengelolaan sampah garing secara runtut yang mendorong warga lokal untuk mengperankan aktif di dalamnya. Mekanisme itu akan menangmpung, mengkoreksi, dan medistribusikan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga warga lokal memperoleh pundi pundi ekonomi dari menabung sampah. Cakupanaktifitas dalam sistem bank sampah dilakukan dari oleh dan untuk masyarakat. Seperti halnya bank konvensional, bank sampah juga memiliki manajerial operasionalnya dilakukan oleh masyarakat. Bank Sampah bahkan bisa juga memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat. Sampah yang disetorkan nasabah dipisah jadi bank sampah membuat budaya baru agar masyarakat mau memilah dan memisah sampahnya. Dengan maksud tersirat bahwa bank sampah ini ingin

menanamkan tatanan sosial baru tentang pentingnya menjaga lingkungan agar lebih ekonomis. Saat ini hanya 42% sampah dikelola secara baik sisanya masih dibuang sembarangan (Sumber data dari suarapembaruan.com).

Bank Sampah Gedawang Asri Kota Semarang luas bangunan yang hanya sebesar 4x7 m itu terpampang konsep dari bank sampah tersebut yaitu "*The Gade, Clean, and Gold*" Diresmikan oleh Pegadaian Persero pada Februari 2019 menjadi pusat pengelolaan sampah pertama di Kota Semarang. Bank Sampah Gedawang Asri mempunyai Ketua bernama Sri Sumiati. Bank Sampah mempunyai program dua mingguan sekali yaitu mengumpulkan sampah dari masyarakat sekitar RW 03 dan RW 05 warga diwajibkan menyetorkan sampah rumahnya minimal 1 kg maksimal 10 kg. total ada 76 member masyarakat yang sudah menabung di Bank Sampah Gedawang Asri sejak 1 Bulan diresmikan. Bank Sampah Gedawang Asri menawarkan pemberian harga yang akan diberikan setiap memberinya untuk harga per kilonya sampah yang dihargai yaitu kardus Rp 1.000 perkg, kertas koran Rp 2.000 perkg dan kertas putih Rp 1.600 perkg. Selain itu, botol bodong putih Rp 2.000 perkg, botol bodong gelas Rp 3.500 perkg dan tutup botol Rp 2.000 perkg. Namun kalau jualnya ke pengepul masih berwujud plastik potongn, harganya lebih mahal jika dibandingkan dalam bentuk masih utuh. Misalnya botol, kalau dijual dalam bentuk utuh harganya hanya Rp 2.000 perkilogram. Namun kalau sudah dicacah harganya bisa mencapai Rp8.000. Bank Sampah Gedawang Asri pun mempunyai opsi menarik agar memberinya lebih tertarik ke Bank Sampah dari pada ke pengepul dengan metode alat yg diberikan oleh pegadaian yaitu mesin pencacah sampah. Berdasarkan catatan Bank Sampah Gedawang Asri, selama Bulan Maret, sampah yang disetorkan warga sebanyak 467,6 kilogram senilai Rp670.410. Sementara sepanjang 1 hingga 20 Desember, sampah yang disetorkan warga ke Bank Sampah Gedawang Asri sebanyak 570,1 kilogram senilai Rp699.050. Tabungan member sampah yang telah memenuhi dapat dikonversikan menjadi uang ataupun emas oleh Pegadaian Persero. Tentu Hal ini merupakan CSR pertama dari Pegadaian Persero dan Pendirian Bank Sampah pertama kali oleh Pegadaian Persero di kota Semarang sebagai perwujudan untuk mengatasi kerusakan lingkungan (Sumber data bank sampah dari Suara Merdeka)

1.7 Kerangka Pikir

Bank Sampah merupakan wadah yang dikelola untuk mengumpulkan sampah yang sudah didaur ulang atau diolah. Hasil dari sampah yang dikumpulkan di bank sampah sudah diatur dan akan dikirim ke tempat pengepul sampah. Tempat Pengepulan Sampah sendiri beda dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Tempat Pengepulan Sampah yaitu wadah atau tempat yang menerima kerajinan dan hasil jadi barang dari bank sampah.

Sementara Tempat Pembuangan Sementara (TPS) itu adalah wadah yang menerima sampah belum jadi alias belum diolah yang nantinya bisa diambil oleh bank sampah, masyarakat yg butuh, pengepul sampah yang butuh dan kemudian sampah sisanya yang tidak terpakai akan diambil oleh pengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pada usaha melaksanakan pengelolaan sampah pemerintah juga mempunyai peran yang utama yaitu naiknya sektor dan aktifitas yang bisa mendorong serta membuat kondisi nyaman untuk keberlangsungan pengelolaan sampah di wilayah tertentu.

Dengan Adanya Bank Sampah yaitu salah satu bagian yang wajib dikembangkan dalam pola lingkungan yang sehat. Karena sampah-sampah itu dapat menciptakan suasana kotor itu dapat diaktifkan ulang jadi lebih bersih. Masyarakat dan Pemerintah dilibatkan dalam Pengelolaan Sampah dalam penelitian terkait Implementasi Program Pengelolaan Persampahan Di Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Untuk lebih paham dapat dilihat dari kerangka pikir berikut.

Implementasi Program Pengelolaan Persampahan Di Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

RENSTRA DLH 2016-2021 Indikator Program Bab VI

**Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan**

- **Tingkat Pelayanan
Penanganan Sampah**
- **Persentase volume sampah
dari TPS**
- **Jumlah Sarana Prasarana**



INDIKATOR



Faktor Pendorong & Penghambat



**Sulit atau tidaknya masalah dikelola yang berkaitan
dengan faktor :**

- **apakah sarana prasarana tps dan pengelolaan sampah
perlu diperbaiki di kelurahan gedawang**
- **perlu meningkatkan kontribusi bank sampah di
kelurahan gedawang**
- **bagaimana memudahkan pengelolaan sampah, sarana
prasana yang terbatas menjadi lebih baik**

Pemahaman kebijakan dalam mengorganisasikan proses implementasi dengan faktor

- **Mengimplementasikan program pengelolaan sampah yang ada di kelurahan gedawang**
 - **Menambah sarana prasarana dan tps serta memperbaiki kualitas pengelolaan sampah jadi lebih baik**
 - **Dukungan dari pihak masyarakat untuk membantu dalam pengelolaan sampah yang ada di bank sampah**

Lingkungan Penunjang

- **Sudah ada Perda No 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah bahwa setiap kelurahan wajib memiliki minimal 1 TPS dan 1 Bank Sampah**

Terwujudnya Pengelolaan Sampah yang efektif

1.7.1 Fokus Penelitian

Fokus Penelitian Implementasi Program Pengelolaan Persampahan Di Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, menggunakan Indikator Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan ; Tingkat Pelayanan Penanganan Sampah, Persentase volume sampah dari TPS, Jumlah Sarana Prasarana.

Sedangkan faktor pendorong dan penghambat menggunakan pendekatan sulit atau tidaknya masalah dikelola, Pemahaman kebijakan dalam mengorganisasikan proses implementasi, Variabel diluar kebijakan yang memengaruhi alur implementasi, Tahapan-Tahapan Dalam Proses Implementasi (Variabel Bergantung).

1.7.2 Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan Fokus Penelitian yang sudah dijabarkan penulis, selanjutnya akan dijabarkan sebagai berikut :

Indikator Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1. Tingkat Pelayanan Penanganan Sampah, pada penelitian ini pengelolaan sampah perlu ditingkatkan lebih lanjut
2. Persentase volume sampah dari TPS, pada penelitian ini sampah yang ada di TPS perlu di perbaiki lebih baik lagi
3. Jumlah Sarana Prasarana, perlu adanya penambahan TPS maupun Bank Sampah agar sampah dapat terkelola dengan baik

Faktor Penghambat dan Pendorong

1. Sulit atau tidaknya masalah dikelola, dalam penelitian ini pengelolaan sampah dan sarana prasarana terbatas menjadi masalah yang perlu kita bahas.
2. Pemahaman kebijakan dalam mengorganisasikan proses implementasi, untuk mengetahui pengelolaan sampah pada bank sampah secara efektif dan memperbaiki sarana prasarana tps yang ada
3. Lingkungan Penunjang, Sudah ada Perda No 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah bahwa setiap kelurahan wajib memiliki minimal 1 TPS dan 1 Bank Sampah

1.8 Operasionalisasi Konsep

Adalah sebuah alat dari penelitian penyebabnya adalah sebuah langkah dalam proses pengambilan data. Ini merupakan sebuah penjelasan dari operasionalisasi

membuat konsep yang sifatnya masih tidak jelas menjadi operasionalisasi yang lebih sederhana dalam mengukur variabel itu sendiri. Sebuah definisi operasionalisasi juga bisa dijadikan sebagai batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan penelitian. Pentingnya operasionalisasi konsep adalah sebagai penjabar dari sebuah penelitian.

Fungsinya menjelaskan bagaimana sebuah program dijalankan dan berdampak bagi masyarakat banyak

Berdasarkan RENSTRA DLH 2016-2021 Indikator Program Bab VI Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Faktor Pendorong & Penghambat dari Daniel Mazmanian dan Sabatier diatas, dapat diketahui keberhasilan implementasi terkait implementasi program pengelolaan persampahan di kelurahan gedawang kecamatan banyumanik kota semarang adalah dengan memperhatikan variabel dibawah ini :

Indikator Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1. Tingkat Pelayanan Penanganan Sampah, pada penelitian ini pengelolaan sampah perlu ditingkatkan lebih lanjut
2. Persentase volume sampah dari TPS, pada penelitian ini sampah yang ada di TPS perlu di perbaiki lebih baik lagi
3. Jumlah Sarana Prasarana, perlu adanya penambahan TPS maupun Bank Sampah agar sampah dapat terkelola dengan baik

Faktor Pendorong & Penghambat

4. Susah tidaknya masalah yang akan dikelola
 - apakah sarana prasarana tps dan pengelolaan sampah perlu diperbaiki di kelurahan gedawang
 - perlu meningkatkan kontribusi bank sampah di kelurahan gedawang
 - bagaimana memudahkan pengelolaan sampah, sarana prasana yang terbatas menjadi lebih baik di kelurahan gedawang
5. Pemahaman kebijakan dalam mengorganisasikan proses implementasi
 - Mengimplementasikan program pengelolaan sampah yang ada di kelurahan gedawang
 - Ketersediaannya diperlukan untuk menambah sarana prasarana dan tps serta memperbaiki kualitas pengelolaan sampah jadi lebih baik
 - Dukungan dari pihak masyarakat untuk membantu dalam pengelolaan sampah yang ada di bank sampah
6. Lingkungan Penunjang
 - Sudah ada Perda No 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah bahwa setiap kelurahan wajib memiliki minimal 1 TPS dan 1 Bank Sampah

1.9 Metode Penelitian

Metode Penelitian biasanya yaitu teknik dalam mengambil data secara asli dari target yang ada di tempat penelitian, serta dapat dipercaya keasliannya, serta dijabarkan menjadi sebangkah ilmu jadi yang mana bisa dipakai dalam mencerna, mencari jalan keluar dan memutuskan solusi yang ada pada manajemen dan administrasi (Sugiyono,2009:3)

1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut (Singarimbun,2008:4):

1. Eksploratif Penelitian biasanya ada maksud dalam menggali, mencari atau mendalami topik suatu permasalahan atau kejadian aneh yang dianut yaitu tentang perumusan problema dengan lebih mendalam.
2. Deskriptif Penelitian deskriptif dimaksudkan supaya penggambaran secara detail dari kejadian masyarakat yang ada. Metode kualitatif menjadi pedoman skema yang akan diteliti dan menjadikan data deskriptif berwujud kalimat yang ditulis atau hasil wawancara ucapan yang berasal manusia serta sikap bisa diawasi. Kemudian, pada agenda itu peneliti tak bisa mengurungkan orang maupun badan ke bentuk hipotesis maupun variabel, dan juga bisa dilihat jadi bentuk sempurna
3. Penelitian Eksplanatori Penelitian ini dilakukan dengan tujuan percobaan pada hipotesis mengenai keterkaitan dengan dampak antara poin sedang diteliti. Apabila supaya data yang sama dijelaskan dengan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis.

Dari pemaparan diatas peneliti memilih untuk menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Karna dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti akan memaparkan gambaran kondisi sebuah fenomena secara lebih mendalam tentang Implementasi Program Pengelolaan Persampahandi Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dengan cara menggambarkan bagaimana kegiatan tersebut dilakukan, apa saja yang terjadi dalam pelaksanaannya maupun perilaku pelaksananya.

1.9.2 Situs Penelitian

Peneliti menggunakan desain penelitian model Implementasi. Penelitian Implementasi adalah penelitian yang melihat pelaksanaan kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah dengan sudut pandang implementasi atau proses pelaksanaannya. Implementasi merupakan proses berjalannya baik tujuan maupun sasaran dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang kemudian ditransformasikan dalam tindakan-tindakan nyata dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan ditujukan untuk kepentingan publik.

Penelitian ini akan mengamati dan menganalisis proses pelaksanaan Implementasi Program Pengelolaan Persampahan di Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik Kota Semarang untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan tersebut dilaksanakan

1.9.3 Subyek penelitian

Definisi subyek penelitian yaitu seseorang dan kerumunan yg diharapkan oleh peneliti untuk dapat menggambarkan mengenai hal yg perlu dilihat suatu gejala dan berhubungan pada kejadian yg pernah dikaji, dari suatu gejala yg dikajii, maupun dari kalimat yang dipanggil informan. Informan adalah seseorang yang berguna pada saat mengasihikan informasi mengenai kondisi dan situasi tempat yang dikaji. Mereka juga wajib memiliki pengalaman yang melimpah serta ilmu mengenai tempat yang dikaji (Moleong,2010:132)

Pada saat menentukan informan yang dikaji diperlukan beberapa kesediaan yaitu, tak boleh bohong. Taat pada yg diucapkan, setia pada aturan, gemar omong, bukan tergolong anggota dari sebangkahkerumunan bertikai diarea tempat yang dikaji, serta memakai arahan unik tentang kejadian yang sudah berlalu. Upaya agar mencari dari pemberi informasi bisa dikerjakann dengan beberapa metode yaitu,

(1) melalui bukti fisik atau nonfisik seseorang pihak berwajib atau memiliki tanggungjawab, bagus dari segi terdidik (pemerintah) ataupun yang tidak terdidik (tetua masyarakat, contohkepala masyarakat atau ketua adat dll)

(2) melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. Dengan wawancara pendahuluan peneliti menilai berdasarkan persyaratan yang dikemukakan diatas (Moleong.2010:133)

Dalam penelitian ini peneliti menentukan subjek yang akan diteliti adalah, staff lingkungan hidup, pengelola bank sampah gedawang, driver truk sampah, anggota bank sampahgedawang

1.9.4 Sumber Data

Lofland dan Lofland dalam Moleong (2010:157) menjelaskan opini dari penemuan data penyokong pada bab penelitian kualitatifdisebut sebagai kalimat dan sikapselanjutnya yaitu penyokong data sekunder contohnya gambar,, foto, arsip serta dokumentasi. Beberapa data yang dipakai dalam penelitian ini

Merupakan kalimat, tindakan sertaperilaku manusia yang ditinjau serta ditanya-tanyakan yaitu acuan data pokok.Penulisan dari penemuan data penting dari jalur tanya jawab maupun yang diamatin yaitu penyatuan hasil upaya dari aktivitas meninjau, menanya, mendengarkan. Peneliti melaksanakan penelitian juga perlu menonton situasi lingkungan dan kondisi sosial dari Kota Semarang khususnya dalam Implementasi Program Pengelolaan Persampahan di Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sehingga dapat diketahui fenomena apa saja yang terjadi.

1.9.5 Jenis Data

Tulisan ini mengenai Implementasi Program Pengelolaan Persampahan di Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik Kota Semarangmempunyai jenis data:

1. Data Utama ialah data yang ditemukan secara riil dari lokasi penelitian. Keaslian data yang ditemukan dari argumentasi serta pertanyaan yang dikejar oleh peneliti kepada informan disaat sesi tanya jawab atau hasil dari perninjauan langsung/observasi, setelahnya data itu diperoleh bisa diaudio maupun catat.

2. Data Sampingan ialah ringkasan tentang situasi maupun fenomena yang sudah kejadiandan dituangkan dalam bentuk coretan tinta dari dokumen, buku, dan internet serta hal lain yang berhubungan dengan penelitian. Pada penelitian ini, agar memperoleh temuan data sekunder peneliti memakai buku, internet dan tulisan yang menguatkan

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Pada tulisan kali ini pengkaji memakai beberapa teknik pengumpulan data, ialah menurut (Sugiyono, 2009:140)

Yang pertama Teknik Interview (wawancara), Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan informan/responden. Dalam penelitian ini pengkaji memakai jenis wawancara bukan terstruktur. Teknik wawancara bukan terstruktur ialah tanya-jawab yang tidak diatur yang mana peneliti tak perlu pakai patokan wawancara yang sudah diatur secara runtut serta komplit dalam upaya mendapat datanya. Prinsip wawancara yang sering dipakai biasanya berwujud garis panjang problematik yang ingin dicarita. Pengkaji memakai tanya-jawab tak beraturan supaya pengkaji santai dalam mengulik-ulik yang diperlukan untuk menemukan sampel serta informasi yg berusaha dalam memperluas banyak pengetahuan mengenai suatu gejala. Jadi tanpa ada jarak supaya peneliti dalam mengulik data.

Yang kedua adalah Teknik Observasi Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, penulis menggunakan tipe Observasi Non-Partisipan (Non-Participant Observation). Pengumpulan data dengan observasi non-partisipan ini tidak mendapat data yang mendalam dan tidak sampai pada tahap tingkat makna. Pada pengumpulan data observasi non-partisipan, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat secara independen. Peneliti merangkum, mencatat serta setelahnya bisa menciptakan simpulan mengenai tindakan warga lokal yang lagi dikajii. Kalau dari instrumensi yang dianut, peneliti ialah gaya memndapatkan data dalam bentuk data yang berwujud gambar, dokumen asli, temuan data asli ketika terjun lapangan atau meminta petugas kelurahan.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Spradley (Sugiyono,2009:253) membagi analisis data dalam penelitian kualitatif berdasarkan tahapan dalam penelitian kualitatif. Tahapan penelitian kualitatif atau Analisis data Kualitatif Menurut Spradley sebagai berikut,

a. Analisis Domain (Domain analysis)

Analisis dengan tujuan untuk memperoleh gambaran obyek/penelitian maupun kondisi sosial. menemukan beragam jenis. Diperoleh dengan pertanyaan grand dan minitour. Peneliti menetapkan domain tertentu sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya. Maka makin banyak domain yang dipilih, maka akan semakin banyak waktu yang diperlukan untuk penelitian menyeluruh dari dan yang umum

b. Analisis Taksonomi (Taxonomic analysis)

Domain yang dipilih tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci, untuk mengetahui struktur internalnya. Dilakukan dengan cara Analisis Data Kualitatif observasi terfokus.

c. Analisis komponensial (Componential analysis).

Mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengontraskan antar elemen. Dilakukan melalui observasi dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengontraskan (contras question).

d. Analisis Tema Kultural (discovering cultural theme).

Mencari hubungan diantara domain, dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan, dan selanjutnya dinyatakan ke dalam tema/judul penelitian Sumber: Sugiyono,2009

Dalam penelitian ini, pengkaji memakai teknik analisis komponensial. Teknik ini mengkomparasikan atau menyari yang bedadari yang semestinyakejadian dengan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dilakukan melalui observasi dan wawancara untuk mendapatkan hasilnya terhadap penelitian mengenai Implementasi Program Pengelolaan Persampahan Di Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Analisis data merupakan proses pengolahan data ke suatu bentuk yang lebih mudah dimengerti dan dipahami yang kemudian diinterpretasikan dalam sebuah laporan penelitian. Adapun proses kegiatan analisis data ini (Sugiyono, 2009: 247-253) terdiri dari:

a. Reduksi data Diartikan sebagai merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Pengkajian data ialah gabungan dari informasi yang dirapikan menaruh peluang kemunculan simpulan dan pemungutan sikap. Miles and Huberman (1984) menyatakan, *the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text.* (Sugiyono, 2000: 249), Adapun dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada bentuk penguian yang sifatnya deskriptif.

c. Conclusion Drawing/verification Berdasarkan data-data yang diperoleh, pengkaji berusaha tuk memperoleh simpulan dari simpulan yang samarr jadi gamblang, karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung. Tarikan simpulan ini juga terkait pada perolehan besar kecilnya data itu.

1.9.8 Kualitas Data

Penelitian kualitatif gaya yang dipakai biasanya memakai pertanggungjawaban yang amat tinggi. Pertanggungjawaban yang amat tinggi supaya mempertontonkan hasil metoda kualitatif yang sama dengan sesungguhnya (omongan nyata yg dikroscek dari responden yang dibahas). Gaya dalam meraih level yg dibuktikan dari fakta di daerah penelitian, makanya pakai triangulasi sebagaikroscek dari kenyataan dari suatu keaslian data yang berasal dari rekomendasi data belakang agar supaya jadi bahan kroscekan atau bahan komparasi data itu (dalam Sugiyono, 2009: 241).

Penelitian kualitatif yang ada disini memakai triangulasi modus. Menariknya yang ada pada paparan ini pengkaji memakai metoda berkumpulnya fakta yang asalnya dari pusat yang sama (dalam Sugiyono, 2009: 241). Pengnyelidik memerlukanberkumpulnya koleksi data dari kumpulan hasil wawancaraa, observasi tidak terstruktur, cuplikan fakta yang ada